



Judul : Banggar Minta Roadmap Pengendalian Utang
Tanggal : Selasa, 14 September 2021
Surat Kabar : Kontan
Halaman : 2

Lobi

Banggar Minta Roadmap Pengendalian Utang

JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk membuat rencana kerja atau *roadmap* kebijakan pembiayaan utang untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Bahkan Banggar meminta *roadmap* tersebut dimasukkan ke dalam Undang-Undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"*Roadmap* bakal jadi rekomendasi dan panduan yang mengikat," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat panitia kerja (Panja), Senin (13/9).

Menurut Said, penyusunan *roadmap* kebijakan pembiayaan utang bisa mengacu rekomendasi kebijakan utang dari International Monetary Fund (IMF) yakni *Financing and Debt Service Relief* juga referensi rasio bunga terhadap penerimaan.

Selain itu, *roadmap* kebijakan utang juga perlu mengarahkan agar porsi kepemilikan surat berharga negara (SBN) ke arah bilateral untuk mengurangi pembelian SBN dari perbankan dan Bank Indonesia (BI). Sebab saat ini, besarnya kepemilikan SBN oleh perbankan saat ini, membuat bank mengurangi perannya dalam memberikan likuiditas terhadap sektor riil.

Said juga bilang, utang tahun 2022 tetap diarahkan sebagai instrumen *countercyclical* yang dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan untuk mendukung kebijakan eks-pansif dalam koridor konsolidasi fiskal.

Yusuf Imam Santoso